

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



## **NOTA PENGANTAR**

**TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**Padang, Desember 2009**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### NOTA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

---

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Yth, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat*

*Yth, Rekan-rekan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat*

*Yth, Sekretaris Daerah, Para Asisten, dan Staf Ahli serta Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*

*Yth, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD di Propinsi Sumatera Barat*

*Yth, Rekan-rekan Wartawan, Undangan, dan Hadirin yang berbahagia,*

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, dengan harapan dapat kita bahas bersama sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, khususnya kebutuhan penanganan pasca bencana.

Selanjutnya melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

***Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,***

Hari ini kita kembali melaksanakan salah satu tugas dan tanggungjawab kita sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas ini merupakan bahagian tugas yang harus kita laksanakan setiap tahun yang merupakan kewajiban konstitusional bagi kita secara bersama-sama. Bagi Anggota Dewan Priode 2009 – 2014, rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna pertama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam masa pengabdianya, sedangkan bagi kami tahun ini merupakan tahun terakhir masa jabatan dan pengabdian kami, namun demikian tentu tugas dan tanggungjawab ini tetap harus kita selesaikan secara bersama-sama sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepada masyarakat Sumatera Barat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 ini diawali dengan kondisi yang masih memprihatinkan dengan terjadinya bencana alam gempa, yang telah merusak sebagian besar wilayah

Sumatera Barat, antara lain infrastruktur, fasilitas umum, perumahan masyarakat, gedung instansi pemerintah, prasarana dan sarana perekonomian, disamping itu juga menimbulkan trauma bagi masyarakat. Dampak dari kejadian ini antara lain menyebabkan lumpuhnya perekonomian sebagian masyarakat.

Selanjutnya disampaikan bahwa hampir lima tahun masa pengabdian kami, banyak hal yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan RPJM Sumatera Barat Tahun 2006-2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007. Untuk itu sebelum menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk mereview kembali tentang berbagai program dan kegiatan yang telah kita laksanakan selama empat tahun kebelakang, hal ini perlu kita lakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian target program serta efektifitasnya dalam menjawab berbagai masalah yang sedang kita hadapi, dan juga tidak kalah pentingnya bagi kita adalah untuk melihat dan mengevaluasi hal-hal prioritas yang segera harus kita tuntaskan pada tahun 2010.

Berbagai perkembangan dan peningkatan yang telah berhasil kita capai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan sudah memperlihatkan hasil yang baik, hal ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara sungguh-sungguh untuk memajukan daerah yang kita cintai ini. Disamping itu kita pantas pula memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua komponen masyarakat Sumatera

Barat yang telah menunjukkan dukungan positif terhadap setiap program dan kegiatan yang kita laksanakan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terjaganya dinamika masyarakat yang kondusif, tingginya tingkat kesadaran sosial dan tanggungjawab bersama sehingga daerah kita termasuk yang aman dan stabil tidak ada gejolak sosial. Hal ini tentu perlu kita syukuri dan diharapkan kondisi ini terus dapat kita pertahankan, sehingga kita bisa lebih optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 yang kami sampaikan ini sudah merupakan hasil rumusan bersama antara pemerintah daerah dan pihak legeslatif yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan pembangunan pada tahun 2010, yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2009, Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) yang telah disepakati tanggal 3 Desember 2010 yang lalu, merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010. Oleh karena itu sebelum kita memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010, pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa pokok-pokok permasalahan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, antara lain :

1. Sebagai sebuah organisasi, Pemerintah Daerah mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi

pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut tentunya harus didukung dengan penyediaan anggaran secara proporsional.

2. Dengan terjadinya bencana gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang lalu, maka asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2010 seyogyanya juga dapat mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah untuk lebih mengutamakan memberikan dukungan pemulihan akibat bencana gempa disamping tetap melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga sinergitas program dan kegiatan dari berbagai sumber akan semakin terlihat dalam rangka menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran, sebagaimana yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan diatas.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010, Perlu adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan pembagian urusan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sehingga implementasi pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan

nasional sehingga implementasi pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan.

4. Hasil kesepakatan yang telah kita tuangkan dalam KUA dan PPAS APBD Tahun 2010, juga telah mempertimbangkan hal-hal yang sangat mendasar, isu aktual, dan program yang berkelanjutan yang telah disusun sebelumnya.

Masalah-masalah mendasar yang tengah dihadapi daerah adalah sebagai berikut :

1. *Pemenuhan Pelayanan Dasar*

- a. Urusan Pendidikan sesuai dengan UU No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memprioritaskan urusan pendidikan pada tahun 2010 sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Dalam Rancangan APBD Tahun 2010, pengalokasian dana pendidikan belum mampu mencapai sebesar 20% dari APBD, namun pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan prosentase alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut, yang dialokasikan pada beberapa SKPD terkait, dimana pada tahun lalu sebesar 13,42 % sedangkan tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 15,78%. Alokasi dana pendidikan ini antara lain digunakan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; fasilitasi Sekolah Berstandar Internasional (SBI), fasilitasi siswa berprestasi; rehabilitasi ruang kelas; peningkatan

kualifikasi guru dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

- b. Urusan Kesehatan, yang digunakan antara lain untuk peningkatan upaya kesehatan masyarakat; perbaikan gizi masyarakat; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; peningkatan manajemen dan pelayanan Rumah Sakit serta pembangunan sarana prasarana bidang kesehatan.
- c. Urusan Perumahan dan Pemukiman, yang digunakan untuk koordinasi dan fasilitasi pengembangan pemukiman dan kelembagaan perumahan.

2. *Isu Aktual,*

- a. Perlu segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan fisik dan non fisik akibat bencana alam gempa bumi, khususnya dalam rangka pembuatan rencana induk, rencana aksi dan desain aplikasi lainnya pada bangunan-bangunan kantor pemerintah yang rusak.
- b. Tahun 2010 merupakan tahun politik, dengan berlangsungnya pemilihan kepala daerah provinsi dan 13 kepala daerah kabupaten/kota

3. *Permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian untuk tahun ini antara lain :*

- a. Implementasi pengamalan agama ditengah kehidupan masyarakat masih terbatas dalam pelaksanaan ibadah wajib, namun perilaku sosial masih perlu ditingkatkan mengacu kepada nilai-nilai religius



- b. Maraknya budaya populer atau asing belum diiringi dengan integritas budaya lokal, sehingga budaya lokal kalah bersaing terutama dalam kehidupan generasi muda dan anak-anak
  - c. Belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun
  - d. Masih terdapat masyarakat buta aksara sebesar 0,02%
  - e. Akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan
  - f. Standar pelayanan dan transparansi pelayanan publik yang masih kurang dan belum merata baik waktu, biaya maupun prosedural
  - g. Masih belum terintegrasinya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
  - h. Peningkatan kesiapan masyarakat terhadap kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat
  - i. Percepatan pembangunan jalan evakuasi bencana alam dan tsunami
  - j. Percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan kehidupan sosial masyarakat
  - k. Keterpaduan dan integrasi dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan nagari sebagai basis pembangunan
4. *Pemenuhan Pelayanan Khusus (Sinkronisasi Program)*, berupa sinkronisasi program SKPD dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis guna penanganan masalah yang dihadapi; penyediaan dana pendamping untuk mendukung program pusat di daerah dan Kab/Kota; dukungan program dan kegiatan untuk

percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan pencapaian peningkatan IPM.

5. *Program berkelanjutan dan Program Strategis*, yang bersifat strategis untuk pencapaian program kerja jangka menengah dan terutama yang telah disepakati baik pemerintah pusat, maupun daerah

### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati.***

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010, telah dialokasikan anggaran pendapatan daerah sesuai dengan kesepakatan dalam PPAS yaitu sebesar Rp. 1.622.679.120.250,- dan anggaran Belanja sebesar Rp. 1.817.068.120.250,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 909.191.000.250,- Belanja Langsung sebesar Rp. 907.877.120.000,- sehingga terdapat defisit Rp. 194.389.000.000,-.

Defisit anggaran tersebut ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang ditargetkan sebesar Rp.236.410.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 42.021.000.000,- lagi dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Titipan dari PT. Rajawali sebesar Rp. 37.021.000.000,-

Berdasarkan pengalokasian tersebut diatas, maka secara keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 1.859.089.120.250,- dengan rincian anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 1.622.679.120.250,- dan anggaran penerimaan

pembiayaan sebesar Rp. 236.410.000.000,-, sedangkan disisi belanja dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp. 1.817.068.120.250 dan alokasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 42.021.000.000,-

***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati.***

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa secara rinci anggaran Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 813.467.154.000,- meningkat sebesar Rp. 89.709.578.000,- atau 12.39% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 723.757.576.000,- yang terdiri dari :

1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 616.188.454.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 881.548.000,- atau 0,14% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 617.070.002.000,- yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Restribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 26.721.793.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 53.969.000,- atau 0.20% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar 26.667.824.000,- yang terdiri dari Restribusi Jasa Umum; Restribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu.

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 41.824.907.000,- atau meningkat 12,67% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 37.120.000.000,- yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD/BUMN; dan perusahaan patungan/milik swasta.
  - 4) Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp. 128.732.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 85.832.250.000,- atau 200.08% dibandingkan tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 42.899.750.000,- yang terdiri dari penerimaan jasa giro; fasilitas sosial dan umum; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan aset. Peningkatan ini terjadi karena adanya penerimaan klaim asuransi dari PT. Askrida akibat terjadinya bencana gempa sebesar Rp. 75.000.000.000,-
- b. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 769.696.966.250,- atau berkurang sebesar Rp. 16.925.973.750,- atau 2,15% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp 786.622.940.000,-, yang terdiri dari :
- 1) Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp. 87.777.450.000,- atau berkurang sebesar Rp. 2.723.480.000,- atau 3,01% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 90.500.930.000,-
  - 2) Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.294.490.000,- atau sama dengan tahun lalu.
  - 3) Dana Alokasi Umum telah ditetapkan sebesar Rp. 661.617.385.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.674.375.000,- atau 1,95% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 648.943.010.000,-

4) Dana Alokasi Khusus, dialokasikan sebesar Rp. 19.220.500.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 27.958.500.000,- atau 59,26% dari tahun lalu yang dialokasikan sebesar Rp. 47.179.000.000,-

5) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dialokasikan sebesar Rp. 1.081.631.250,- yang merupakan alokasi untuk pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp.39.515.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 26.000.000.000,- dari tahun lalu, yang berasal dari Financial Reward dari Menteri Keuangan.

Selanjutnya rencana penerimaan pembiayaan tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 236.410.000.000,- yang berasal dari target penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun 2009.

### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati.***

Dari target pendapatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, direncanakan untuk belanja berdasarkan kelompok belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp.1.859.089.120.250,- dialokasikan untuk :

1) Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 909.191.000.250,- atau meningkat sebesar

Rp. 124.963.747.795,- atau 15,93% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 784.227.252.455,- Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 534.497.772.250,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 104.870.376.140,- atau 24,41% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 429.627.396.110,-. Peningkatan belanja pegawai ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan perhitungan across sebesar 2,5% dan kenaikan gaji pegawai sebesar 5% dari gaji pokok serta adanya dana tambahan perimbangan dari pemerintah pusat untuk guru-guru yang telah mendapat sertifikasi.
2. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 42.087.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.417.000.000,- atau 207,88% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 13.670.000.000,-. Peningkatan alokasi belanja hibah ini disebabkan adanya pemberian hibah kepada KPUD dalam rangka Pilkada. Sesuai ketentuan pemberian belanja hibah ini bertujuan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh organisasi semi pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, seperti hibah kepada PKK, KONI, dan Pramuka

3. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp. 24.173.500.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 1.150.500.000,- atau 4,54% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 25.324.000.000,- Penurunan target belanja bantuan sosial ini sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, bahwa bantuan sosial tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun dan mempunyai kejelasan penggunaannya, yang tujuannya dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
4. Belanja Bagi Hasil pada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.273.750.328.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.598.217.705,- atau 7,71% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 254.152.110.295,-. Besarnya alokasi untuk belanja ini tergantung pada penetapan target pendapatan yang dialokasikan dalam tahun berkenaan ditambah dengan kekurangan tahun lalu yang harus dibayarkan pada tahun anggaran ini.
5. Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.28.332.400.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 28.772.043.050,- atau 50,38% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 57.104.443.050,-. Penurunan alokasi belanja ini disebabkan adanya kegiatan-kegiatan dari hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD Tahun 2009, berupa pembangunan gedung ruang kelas SD, ruang kelas baru SMP dan rehab ruang kelas SMP,SMA/SMK tidak dialokasikan lagi, karena bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

6. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 6.350.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.000.697.000,- atau 46,00% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 4.349.303.000. Belanja ini merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya
2. Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 907.877.122.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 15.588.232.450,- atau 1.69% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 923.465.352.450,-. Adapun yang termasuk belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang dipergunakan untuk mendanai belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS tahun 2010. Distribusi belanja langsung yang dikaitkan dengan kewenangan dan urusan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut ;

#### A. Urusan Wajib

Untuk urusan wajib, merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah propinsi, dan



kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam tahun 2010, dianggarkan sebesar Rp. 849.630.172.000,- atau 93,75% dari APBD, yang meliputi :

- 1) Urusan Pendidikan, dialokasikan Rp. 156.357.989.900,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Sekolah Pembangunan Pertanian Padang) Hortikultura dan Biro Bina Sosial
- 2) Urusan Kesehatan, dialokasikan Rp. 103.315.902.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi, RSJ HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman.
- 3) Urusan Pekerjaan Umum, dialokasikan sebesar Rp. 334.505.453.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Bappeda.
- 4) Urusan Perumahan, dialokasikan sebesar Rp. 425.000.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim.
- 5) Urusan Penataan Ruang, dialokasikan Rp. 650.000.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Bappeda.
- 6) Urusan Perencanaan Pembangunan, dialokasikan sebesar Rp. 10.344.656.000,- yang dilaksanakan oleh Bappeda.
- 7) Urusan Perhubungan, dialokasikan Rp. 4.877.906.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika.

- 8) Urusan Lingkungan Hidup, sebesar Rp. 5.855.360.000,- yang dilaksanakan oleh Bepedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Sumberdaya Mineral.
- 9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dialokasikan sebesar Rp. 2.987.100.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 10) Urusan Sosial, dialokasikan Rp. 13.737.550.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
- 11) Urusan Ketenagakerjaan, sebesar Rp. 7.933.030.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 12) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dialokasikan sebesar Rp. 4.833.114.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- 13) Urusan Penanaman Modal, sebesar Rp. 2.288.025.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi dan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
- 14) Urusan Kebudayaan, sebesar Rp. 15.814.464.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)

- 15) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dialokasikan sebesar Rp. 18.127.075.350,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
- 16) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dialokasikan sebesar Rp.5.681.046.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol -Linmas dan Satpol PP.
- 17) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dialokasikan sebesar Rp. 163.803.559.250,- yang dilaksanakan oleh DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat Wilayah, Kantor Penghubung, BKD dan Badan Diklat.
- 18) Urusan Ketahanan Pangan, sebesar Rp. 2.312.543.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- 19) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebesar Rp. 7.374.215.500,- yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kependudukan)
- 20) Urusan Kearsipan, sebesar Rp. 2.425.555.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan
- 21) Urusan Komunikasi dan Informatika, plafon anggaran sementara sebesar Rp. 1.639.000.000,- yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokoler)

22) Urusan Perpustakaan, sebesar Rp. 1.896.000.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan.

#### B. Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Sumatera Barat. Dalam tahun 2010 urusan pilihan dialokasikan sebesar Rp. 40.415.842.000,- yang meliputi urusan :

- 1) Urusan Pertanian, dialokasikan sebesar Rp. 19.911.966.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian & TPH; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan.
- 2) Urusan Kehutanan, dialokasikan sebesar Rp. 2.236.510.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- 3) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, dialokasikan sebesar Rp. 2.674.820.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
- 4) Urusan Pariwisata sebesar Rp. 6.517.425.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- 5) Urusan Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp. 4.358.521.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan & Perikanan.
- 6) Urusan Perdagangan, dialokasikan Rp. 2.946.000.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan.

- 7) Urusan Industri, dialokasikan Rp. 1.770.600.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

### ***Hadirin yang berbahagia***

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa dari alokasi belanja langsung tersebut, sudah termasuk program kegiatan dalam rangka penanggulangan pasca bencana sebesar Rp. 207.097.299.000,- yang sebahagian besar digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah, kantor, jalan dan jembatan dengan rincian :

- 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 19.161.442.585.030,-
- 2) Dinas Kesehatan sebesar sebesar Rp. 5.541.806.870,-
- 3) RSJ HB. Sa'anin sebesar Rp. 33.811.000,-
- 4) RSUD Pariaman sebesar Rp. 4.478.141.000,-
- 5) Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman sebesar Rp. 98.421.650.000,-
- 6) Dinas PSDA sebesar Rp. 37.912.580.000,-
- 7) BAPPEDA sebesar Rp. 450.000.000,-
- 8) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 425.000.000,-

- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 4.719.574.500,-
- 10) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp. 320.000.000,-
- 11) Dinas Sosial sebesar Rp. 100.000.000,-
- 12) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 300.000.000,-
- 13) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 700.000.000,-
- 14) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 2.239.000.000,-
- 15) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.265.000.000,-
- 16) Dinas Perkebunan sebesar Rp. 300.000.000,-
- 17) Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 225.000.000,-
- 18) Dinas Peternakan sebesar Rp. 1.312.400.000,-
- 19) Dinas Pertanian sebesar Rp. 12.588.750.000,-
- 20) Sekretariat Daerah sebesar Rp. 100.000.000,-

3. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 42.021.000.000,- yang digunakan untuk :
  - a. Penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari sebesar Rp. 5.000.000.000,-
  - b. Titipan PT. Rajawali sebesar Rp. 37.021.000.000,-

### ***Hadirin yang berbahagia***

Kami meyakini bahwa proses yang akan dilalui untuk sampai kepada penetapan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 merupakan suatu rangkaian pembahasan yang melelahkan, hal ini disebabkan oleh padatnya agenda pembahasan yang akan kita lewati.

Dengan telah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010 ini, diharapkan akan dapat kita bahas secara mendalam dan intensif melalui pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam persidangan berikutnya, kita dapat lebih menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010 ini.

Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak kita semua, mari kita bahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 ini didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas guna kesempurnaan dengan semangat kebersamaan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua

Demikianlah Nota Pengantar ini kami sampaikan dihadapan Sidang Dewan Yang Terhormat. Mohon ma'af atas berbagai kekurangan, semoga apa yang kita upayakan akan bernilai ibadah bagi kita dan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, serta memperoleh ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin

Terima kasih, Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum W.W

Padang, 8 Desember 2010

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

